

**ANALISIS MENDALAM ATAS KASUS KORUPSI ANGELINA
SONDAKH: TINJAUAN TERHADAP FAKTOR-FAKTOR
PEMICU DAN IMPLIKASINYA PADA SISTEM ANTI KORUPSI**

**Anugrah Dwi Putra¹, Arifianto², Dewi Hasanah³, Falirina Nurfa⁴, Hejri Jay Fahri⁵,
Imam Prayudha Harahap⁶, Rahmadifika⁷, Raisha Maryam⁸, Sayid Khairy Fajar⁹,
Fajriawati¹⁰**

raishamaryam23@gmail.com¹, fajriawati@umsu.ac.id²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstract: *This research examines the corruption case of Angelina Sondakh in 2012, an Indonesian politician, to analyze its impact on state finances and public trust. Involving factors such as weak supervision, lack of transparency, political nepotism and a culture of corruption, this research highlights the complexity of the drivers of corruption in Indonesia. The implications of this case for the anti-corruption system include damaging integrity, creating public distrust, the potential for impunity, and reducing the drive to prevent corruption. The economic impact and decline in foreign investor confidence is also a serious concern. In responding to negative implications, research recommends strengthening the legal system, increasing transparency, supporting anti-corruption institutions, public education, international cooperation, and the application of technology. Thus, this research emphasizes the need for firm and transparent action to restore public trust, encourage the prevention of corruption, and maintain sustainable development in Indonesia.*

Keywords: *Corruption, Angelina Sondakh, Anti-Corruption System.*

Abstrak: Penelitian mendalam ini mengenai kasus korupsi Angelina Sondakh pada 2012, seorang politisi Indonesia, untuk menganalisis dampaknya terhadap keuangan negara dan kepercayaan masyarakat. Melibatkan faktor-faktor seperti kelemahan pengawasan, ketidaktransparan, politik nepotisme, dan budaya koruptif, penelitian ini menyoroti kompleksitas pemicu korupsi di Indonesia. Implikasi kasus tersebut terhadap sistem anti-korupsi mencakup merusaknya integritas, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, potensi impunitas, dan penurunan dorongan pencegahan korupsi. Dampak ekonomi dan penurunan kepercayaan investor asing juga menjadi perhatian serius. Dalam merespons implikasi negatif, penelitian merekomendasikan penguatan sistem hukum, peningkatan transparansi, dukungan lembaga anti-korupsi, edukasi masyarakat, kerjasama internasional, dan penerapan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini menekankan perlunya tindakan tegas dan transparan untuk memulihkan kepercayaan publik, mendorong pencegahan korupsi, dan menjaga keberlanjutan pembangunan di Indonesia.

Kata Kunci: Korupsi, Angelina Sondakh, Sistem Anti Korupsi.

PENDAHULUAN

Perilaku korupsi di Indonesia mencakup berbagai bentuk, mulai dari suap, nepotisme, kolusi, hingga penyalahgunaan kekuasaan. Faktor-faktor seperti kurangnya transparansi, rendahnya gaji pegawai, dan lemahnya sistem pengawasan dapat menjadi pemicu. Pemerintah dan lembaga antikorupsi seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terus berupaya untuk menanggulangi perilaku korupsi dengan langkah-langkah pencegahan dan penindakan. Meskipun demikian, upaya ini seringkali memerlukan dukungan seluruh masyarakat untuk mencapai efektivitas maksimal. Korupsi juga telah menodai Hak Asasi Masyarakat Indoneasia (Harisman & Fajriawati, 2022).

Korupsi merujuk pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi secara ilegal. Secara hukum, berbagai negara memiliki undang-undang yang melarang dan menghukum tindakan korupsi. Hukuman biasanya mencakup denda, penahanan, atau hukuman pidana tergantung pada tingkat pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan (Stiawan, 2015: 5).

Angelina Sondakh adalah seorang politisi Indonesia yang lahir pada 22 November 1971. Dia merupakan anggota Partai Demokrat dan pernah menjabat sebagai anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Namun, namanya lebih dikenal setelah terlibat dalam kasus korupsi terkait proyek pembangunan wisma atlet di Hambalang. Pada tahun 2013, Angelina Sondakh dihukum penjara selama 4 tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta atas keterlibatannya dalam korupsi tersebut. Kasus ini menyoroti masalah korupsi di sektor pembangunan dan mencerminkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dampak negatif yang sangat berbahaya dari korupsi dalam jangka panjang adalah kerusakan pada generasi muda. Di masyarakat yang terkendali oleh korupsi, anak-anak tumbuh dengan perilaku antisosial, dan generasi muda cenderung menganggap korupsi sebagai sesuatu yang biasa atau bahkan menjadi bagian dari budaya, menyebabkan perkembangan karakter yang terbiasa dengan ketidakjujuran dan kurang tanggung jawab. Jika kondisi generasi muda suatu bangsa seperti itu, maka masa depan bangsa tersebut dapat diprediksi menjadi suram (Napisa & Yastio, 2021: 565).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research merupakan pendekatan yang fokus pada pencarian, evaluasi, dan pemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia di perpustakaan atau dalam bentuk dokumen tertulis. Peneliti mengandalkan keakuratan dan kualitas informasi dari koleksi perpustakaan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang kerangka teoretis dan konteks topik penelitian sebelum melibatkan diri dalam metode penelitian lainnya. Dengan demikian, library research membantu membangun landasan pengetahuan yang kuat sebelum menjalankan pendekatan penelitian lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kasus Korupsi Angelina Sondakh

Pada tahun 2012, Angelina Sondakh, seorang politisi Indonesia, divonis bersalah dalam kasus korupsi terkait dana bantuan sosial. Ia dihukum karena terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang terkait proyek dana bantuan sosial senilai miliaran rupiah ketika menjabat sebagai anggota DPR dan Ketua Fraksi Partai Demokrat. Dalam kasus tersebut, Angelina Sondakh dinyatakan terlibat dalam merancang proyek fiktif dan menggunakan dana bantuan sosial untuk kepentingan pribadi. Ia dihukum penjara dan denda sebagai akibat dari perbuatan korupsi tersebut. Kasus ini menunjukkan betapa

korupsi dapat merugikan keuangan negara dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik (Widjaja & Sirait, 2023: 510).

Angelina Sondakh terlibat dalam kasus korupsi yang melibatkan beberapa faktor pemicu. Salah satunya adalah kelemahan dalam pengawasan tindakan politisi, memungkinkan praktik korupsi terjadi tanpa terdeteksi oleh sistem pengawasan yang kurang efektif. Ketidaktransparan dalam keputusan dan penggunaan anggaran juga memberikan peluang bagi tindakan korupsi tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

Selain itu, adanya celah dalam proses pengelolaan keuangan atau alokasi anggaran menciptakan peluang korupsi yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Faktor politik seperti patronase atau nepotisme juga dapat menjadi pemicu korupsi di level politik, di mana keputusan-keputusan didasarkan pada hubungan politik daripada kepentingan publik. Ketidakpatuhan terhadap norma etika dan integritas juga dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam praktik korupsi. Sistem hukum yang lemah dalam menindak pelaku korupsi memberikan sinyal bahwa risiko hukuman rendah, yang dapat mendorong perilaku koruptif. Terakhir, adanya budaya atau lingkungan di sekitar individu yang menerima dan menguatkan praktik korupsi juga turut berkontribusi pada kasus korupsi yang melibatkan Angelina Sondakh.

Implikasi Kasus Korupsi Angelina Sondakh Terhadap Sistem Anti Korupsi

Korupsi memiliki dampak yang kompleks dan merugikan terhadap berbagai aspek masyarakat dan pemerintahan. Sebuah contoh nyata dari implikasi korupsi terhadap sistem anti-korupsi adalah kasus yang melibatkan Angelina Sondakh. Dalam konteks ini, terungkapnya kasus korupsi Angelina Sondakh memunculkan kekhawatiran serius terhadap integritas sistem anti-korupsi. Kepercayaan masyarakat pada lembaga penegak hukum dan pemerintah dapat tergerus, karena publik melihat bahwa bahkan mereka yang seharusnya menjaga kejujuran bisa terlibat dalam praktik korupsi.

Ketidakpercayaan ini tidak hanya berdampak pada tingkat individual atau institusional, tetapi juga bisa merugikan upaya pencegahan korupsi. Masyarakat yang kecewa dan skeptis mungkin kurang bersedia untuk mendukung kebijakan pencegahan atau melaporkan tindakan korupsi yang mereka saksikan. Selain itu, kasus seperti ini menciptakan potensi impunitas, di mana pelaku korupsi tidak ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang tegas. Hal ini dapat memberikan sinyal bahwa praktik korupsi dapat terjadi tanpa risiko signifikan, mengurangi efektivitas sistem anti-korupsi (Suyatna, 2020: 328).

Dampaknya juga dapat dirasakan secara ekonomi, dengan alokasi dana publik yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, menyebabkan kerugian ekonomi dan menghambat pembangunan. Selain itu, penurunan kepercayaan investor asing dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakstabilan. Dengan demikian, kasus seperti ini tidak hanya mengancam integritas lembaga-lembaga anti-korupsi, tetapi juga menciptakan tantangan serius dalam membangun kepercayaan publik, mendorong pencegahan korupsi, dan memastikan keberlanjutan pembangunan yang berkelanjutan. Perlu tindakan tegas dan transparan untuk mengatasi implikasi negatif korupsi dan memulihkan kepercayaan masyarakat pada sistem anti-korupsi (Wahyuningrum, 2020: 242).

Adapun berikut dibawah ini terkait dampak korupsi yang dilakukan oleh Angelina Sondakh terhadap sistem anti korupsi:

1. Merusak Integritas Sistem Anti-Korupsi. Kasus korupsi Angelina Sondakh menciptakan kesan bahwa bahkan individu di dalam sistem anti-korupsi bisa terlibat, merugikan integritas lembaga-lembaga penegak hukum.

2. Ketidakpercayaan Publik. Terungkapnya tindak korupsi oleh Angelina Sondakh memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap kejujuran pejabat publik, melemahkan dukungan publik terhadap upaya pencegahan dan penindakan korupsi.
3. Berpotensi Mendorong Impunitas. Jika Angelina Sondakh tidak dihukum secara tegas, hal ini dapat menciptakan persepsi bahwa pejabat tinggi dapat terhindar dari konsekuensi hukum, memberikan contoh impunitas.
4. Melemahkan Dorongan Pencegahan Korupsi. Kasus ini dapat membuat pihak berwenang ragu-ragu untuk menerapkan kebijakan pencegahan yang lebih ketat, karena kegagalan dalam mencegah korupsi di tingkat tertinggi.
5. Menurunkan Kepercayaan pada Lembaga Penegak Hukum. Terlibatnya Angelina Sondakh dalam kasus korupsi menciptakan kekhawatiran bahwa lembaga penegak hukum mungkin tidak dapat mengatasi pelanggaran di tingkat tinggi, menurunkan kepercayaan masyarakat pada lembaga-lembaga tersebut.

Keseluruhan, kasus korupsi Angelina Sondakh mencerminkan potensi rusaknya kepercayaan publik pada sistem anti-korupsi dan menunjukkan perlunya perbaikan dalam penegakan hukum dan pencegahan korupsi.

Langkah Pemberantasan Korupsi

Langkah yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi adalah pertama adanya penguatan Sistem Hukum. Dalam upaya pemberantasan korupsi, Indonesia telah memprioritaskan penguatan sistem hukum. Undang-undang yang lebih ketat terkait korupsi telah dihasilkan dan diterapkan. Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi semakin tegas dan lebih terbuka. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan kasus korupsi di pengadilan.

Kedua, Transparansi dan Akuntabilitas. Pemerintah fokus pada peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dan kebijakan. Partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi kebijakan pencegahan korupsi dihargai. Penerapan standar etika tinggi untuk pejabat publik menjadi langkah kunci dalam memperkuat akuntabilitas mereka.

Ketiga, Penguatan Lembaga Anti-Korupsi. Lembaga-lembaga anti-korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendapatkan dukungan dan keleluasaan yang diperlukan. Keberlanjutan dan independensi lembaga-lembaga ini dijaga, sementara evaluasi dan reformasi terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja mereka.

Keempat, Pendidikan dan Kampanye Kesadaran. Pemerintah aktif melibatkan masyarakat melalui kampanye kesadaran dan pendidikan tentang dampak negatif korupsi. Nilai-nilai integritas, etika, dan anti-korupsi ditanamkan dalam berbagai lapisan masyarakat untuk menciptakan budaya yang menolak korupsi.

Kelima, Kerjasama Internasional. Indonesia intensif dalam kerjasama internasional, menjalin hubungan erat dengan lembaga-lembaga internasional untuk pertukaran informasi dan pengembangan kapasitas. Kerja sama bilateral digalakkan untuk mengejar dan menghukum pelaku korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Keenam, Teknologi dan Inovasi. Penggunaan teknologi diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Sistem informasi digunakan untuk memantau dan mendeteksi potensi tindakan korupsi, menciptaka (Rahmawati, 2023: 36).

KESIMPULAN

Kasus korupsi Angelina Sondakh menggambarkan dampak serius terhadap integritas sistem anti-korupsi di Indonesia. Faktor pemicu seperti kelemahan pengawasan, ketidaktransparan, dan budaya koruptif menciptakan lingkungan yang mendukung praktik korupsi. Implikasinya meliputi rusaknya kepercayaan masyarakat, potensi impunitas, dan penghambatan upaya pencegahan korupsi. Kasus ini juga menyoroti perlunya tindakan tegas, transparansi, dan perbaikan dalam penegakan hukum untuk memulihkan kepercayaan publik, mendorong pencegahan korupsi, dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mengatasi implikasi negatif ini, langkah-langkah pemberantasan korupsi perlu diperkuat, seperti penguatan sistem hukum, peningkatan transparansi, dukungan terhadap lembaga anti-korupsi, edukasi masyarakat, kerjasama internasional, dan penerapan teknologi. Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan perlunya tindakan tegas dan transparan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat pada sistem anti-korupsi, mendorong pencegahan korupsi, dan menjaga keberlanjutan pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Harisman, H., & Fajriawati, F. (2022, April). Penanggungjawab Terhadap Hak Asasi Manusia. In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 1, No. 1, pp. 408-413).
- Harisman, H., & Fajriawati, F. (2022, April). Penanggungjawab Terhadap Hak Asasi Manusia. In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 1, No. 1, pp. 408-413).
- LIA, M. (2023). *The Grammatical Error Analysis Of Angelina Sondakh Speaking Performance* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Novita, D. (2016). Konstruksi media dalam memberitakan politisi perempuan yang terlibat korupsi (Analisis framing kritis pemberitaan harian umum Kompas terhadap kasus korupsi Angelina Sondakh). *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 73-103.
- Rahmawati, R. (2023). Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, 1(01), 31-39.
- Setiawan, D. *Pola Komunikasi Politisi Dalam Perilaku Korupsi Di Lembaga Legislatif* (Studi Kasus Pola Komunikasi Angelina Sondakh).
- Suyatna, U. (2020). Evaluasi kebijakan tindak pidana korupsi di indonesia. *Sosiohumaniora*, 22(3), 325-333.
- Wahyuningrum, K. S., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 239-258.
- Widjaja, F. A., & Sirait, L. (2023). Differences between English Deixes Used by the Speaker and Indonesian Subtitles Made by the Television Station (Case Study of Angelina Sondakh's Interview on Rosi Kompas TV). *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 9(1), 504-523.